

TESIS

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS  
DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL  
NOTARIS DI KOTA SOLOK**

*Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh gelar*

*Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum*

*Universitas Andalas*



Diajukan Oleh:

**REZA PUTRI**  
**NIM: 2120122003**

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
2. Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# **IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA SOLOK**

(Reza Putri, 2120122003, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)

## **ABSTRAK**

Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat umum wajib berada dalam pengawasan suatu Lembaga yang netral tidak berpihak, mandiri dan independent, tujuan pengawasan tersebut agar Notaris sungguh-sungguh menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kode etik agar menjaga keamanan dari masyarakat yang membuat akta kepada Notaris. Tujuan lainnya adalah agar menghindari dari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati kode etik dari Notaris. Pembentukan dari Lembaga pengawasan dimakud dalam Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di Kota Solok pada tahun 2022 terdapat delapan orang Notaris, Sedangkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Solok pada tahun 2022 yang terperiksa hanya empat orang Notaris. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisa: 1) implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok. 2) kendala dan upaya Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa: implementasi kewenangan MPD Kota Solok dalam memeriksa protokol Notaris telah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dalam pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun 2022 lalu ada sekitar empat dari delapan orang Notaris yang tidak terperiksa. Kendala MPD yaitu pada saat MPD melakukan pemeriksaan, beberapa Notaris tidak berada dikantornya pada saat pemeriksaan. Yang mana mengakibatkan adanya Notaris yang tidak terperiksa oleh MPD. Upaya yang dilakukan oleh MPD yaitu memanggil Notaris yang bersangkutan untuk menghadap ke Kantor Wilayah Kemenkumham untuk diperiksa protokolnya oleh Ketua MPD serta Notaris tidak terperiksa dijadikan prioritas dalam pemeriksaan untuk tahun selanjutnya.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris

# **IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITIES OF THE NOTARY REGIONAL ASSEMBLY OF SUPERVISORY COUNCIL IN EXAMINATION OF NOTARY PROTOCOL IN SOLOK CITY**

(Reza Putri, 2120122003, Notarial Studi Program, Faculty of Law, Postgraduate Andalas University)

## ***ABSTRACT***

Notaries in carrying out their duties for the general public are required to be under the supervision of an institution that is neutral, impartial, and independent. The purpose of this supervision is so that the Notary seriously carries out the duties of his office in accordance with applicable rules and codes of ethics in order to maintain the security of the public who make deeds to the public. Notary Public. Another aim is to avoid Notaries who are irresponsible and do not comply with the Notary's code of ethics. The establishment of a supervisory institution is referred to in Article 1 point 6 of the UUJN which states that the Notary Supervisory Council, hereinafter referred to as the Supervisory Council, is a body that has the authority and obligation to carry out guidance and supervision of Notaries. In Solok City in 2022 there will be eight Notaries, whereas in the examination carried out by the Solok City Regional Supervisory Council in 2022 only four Notaries were examined. Based on this, researchers are interested in conducting further research by analyzing: 1) the implementation of the authority of the Regional Notary Supervisory Council in examining Notary Protocols in Solok City. 2) the obstacles and efforts of the Regional Notary Supervisory Council in carrying out inspections of Notary Protocols in Solok City. This research is descriptive analytical, using an empirical juridical approach. Using primary data as the main material with a study of secondary legal materials. Based on research, it was found that: the implementation of the authority of the Solok City MPD in examining Notary protocols has carried out guidance and supervision related to the implementation which was carried out in 2022, there were around four out of eight Notaries who were not examined. The problem with MPD is that when MPD carries out inspections, several Notaries are not in their offices at the time of the inspection. Which results in Notaries not being checked by the MPD. Efforts made by the MPD were to summon the Notary concerned to appear at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to have the protocol checked by the Chair of the MPD and notaries who were not examined were made a priority in the examination for the following year.

Keywords: *Notary, Regional Supervisory Council, Notary Protocol*